



Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Bonaraja Purba¹, Meisha Fatma Wijaya², Monalisa Lumbantobing³,
Muhammad Bagas Ardhana⁴

Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Abstract

Received: 01 Juni 2024

Revised : 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

John Maynard Keynes' theory regarding the massive economic depression or Great depression that occurred in 1929-1939. Keynes could not be successfully solved by classical and neo-classical methods. Keynes said that an economy that achieves government growth. Therefore, Keynes's theory, which began as a critical theory of political economy in the classical and neo-classical era, has developed into macroeconomics. Second, the role of government in analyzing the country's economic activities has given rise to the importance of the role of policy analysis. Third, with the need for policy analysis, empirical studies are needed to produce policies. The application of Keynes's theory is the most important part in supporting a country's growth, especially in conditions where resources have not been absorbed or used thoroughly. The application of this theory is very effective in increasing output and eradicating unemployment.

Keywords: *political economy, Keynesian political economy, economic growth.*

(*) Corresponding Author: bonarajapurba@gmail.com

How to Cite: Purba, B., Wijaya, M. F., Lumbantobing, M., & Ardhana, M. B. (2024). Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511356>

INTRODUCTION

Kemakmuran adalah cita-cita yang besar selalu diimpikan oleh seluruh masyarakat disetiap negara. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata di mana pun lapisan masyarakat membutuhkan politik bisnis. Regulasi kebijakan ekonomi mengelola kekayaan dan pendapatan suatu negara tanah dan distribusinya dikenal sebagai kebijakan keuangan publik dalam sejarah disebut kebijakan fiskal di zaman modern. Teori ini membahas mengenai ekonomi campuran dimana negara dan sektor swasta sangat memainkan peran yang sangat penting. Kebangkitan ekonomi Keynesian mnejadi sebuah tanda atas berakhirnya ekonomi liberal, sebuah teori ekonomi yang mendasarkan keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan dan berfungsi secara independen tanpa ada campur tangan dari sektor swasta dan pemerintah. Politik keuangan publik dan kebijakan keuangan tujuan yang sama, yaitu sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Keynes mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk melakukan peningkatan permintaan di tingkat makro, mengurangi pengangguran dan terjaidnya deflasi. Jika pemerintah melakukan peningkatan pada



pengeluaran maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya sehingga permintaan secara keseluruhan akan meningkat, tabungan juga akan meningkat untuk digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali normal (Curatman, 2010).

Solusi dari Keynes untuk memecahkan permasalahan kemacetan ekonomi ini adalah dengan melakukan intervensi sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam meningkatkan belanja publik, baik dengan meningkatkan pendapatan maupun dengan membeli barang dan jasa dari pemerintah itu sendiri. Teori Keynesian berpendapat bahwa sektor publik dapat melakukan campur tangan untuk memperbaiki ekonomi secara keseluruhan, dimana pandangan ini berlawanan dengan pemikiran ekonomi yang berlaku saat itu yaitu kapitalisme liberal, teori kapitalisme.

LANDASAN TEORI

Ekonomi Politik

Ialah gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai keterkaitan antara politik dan ekonomi. Yang dimana ekonomi dan politik saling berinteraksi dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilisasi (Mufti, 2018).

Perbedaan dalam pendekatan ekonomi politik dengan ilmu ekonomi murni ialah pandangan mengenai struktur dalam masyarakat. Pada ekonomi politik bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya dalam ilmu ekonomi murni menganggap bahwa struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah pemberian. Kemudian ekonomi politik digunakan oleh beberapa pemikir dan pembuat kebijakan untuk menyebut hubungan pasar dengan kekuasaan (Caporaso & Levine, 1988). Dari pemahaman teori ini dapat menunjukkan bahwa studi ekonomi politik dapat membentuk kerangka berpikir dan analisis kekuatan pasar yang selama ini dianggap bebas dari unsur intervensi politik/negara menjadi tidak lagi berlaku, karena adanya hubungan dan ketergantungan diantara keduanya. Istilah ekonomi politik dapat digunakan dalam dua konteks. Pertama, ekonomi politik dapat digunakan untuk menunjuk bidang penelitian multidisiplin ilmu politik, ekonomi, hukum yang berhubungan dengan politik dan sistem ekonomi masyarakat yang dapat berbeda dari waktu ke waktu. Kedua, ekononomi politik dapat digunakan untuk ilmuwan sosial, jurnalis, untuk merujuk pada interaksi politik, bisnis, kondisi ekonomi yang dapat diamati dalam masyarakat (Mause, 2019). Ekonomi politik secara historis telah berkembang sejak abad 14 sampai abad 16, kemudian ekonomi politik diformalkan oleh Adam Smith pada abad 18. Pada abad 20 ekonomi politik hadir sebagai kajian akademik oleh Robert Dahl dan Charles Lindblom (Dahlan & Wildan, 2022).

Ekonomi Politik Keynesian

Ekonomi politik Keynesian merupakan kritikan terhadap ekonomi politik pada masa klasik Adam Smith yang menempatkan pasar bebas sebagai instrumen yang dianggap dapat memadamkan terciptanya kesejahteraan pada setiap umat manusia

(Yustika, 2009). Pemikiran ini menekankan bahwa perekonomian pasar tidak selalu mencapai keseimbangan sendiri dan dapat mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama dalam situasi resesi atau depresi.

Keynesianisme menyoroti beberapa konsep kunci, seperti Equilibrium (keseimbangan), Competition (persaingan), Money (uang), Expectation (ekspektasi), serta Liquidity (likuiditas) Teori Keynesian menjelaskan adanya siklus bisnis yang mengalami fluktuasi antara periode ekspansi dan kontraksi. Dalam fase resesi, permintaan menurun, sehingga pemerintah diharapkan untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan permintaan dan memulihkan pertumbuhan.

Pendekatan Keynesian menghadirkan unsur di luar pasar yaitu sistem kepemilikan serta fenomena kapitalisme yang dapat menghadirkan ketidakstabilan sehingga sulit terciptanya keseimbangan (Caporaso & Levine, 1988). Pemikiran ekonomi politik Keynesian menganggap bahwa bentuk ekonomi politik yang ideal adalah ketika ada peran negara di dalamnya, karena ketidakadaan peran negara dalam mengatur pasar dapat menyebabkan pengeksploitasian terhadap sumber daya produktif pada umat manusia. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi dan campur tangan dari pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting yang menjadi tujuan penting dalam penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi politik Keynesian ialah pertumbuhan ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu dapat lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi dapat terjadi atau tidak (Arsyad, 2010).

Selain itu pengertian pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan kapasitas jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi untuk penduduknya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat berupa kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode tertentu (Todaro, 2011).

Sedangkan menurut (Sukirno, 2016) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang dapat menyebabkan barang/jasa yang diproduksi dalam masyarakat dapat bertambah dan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang melibatkan analisis teks dan dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan pemikiran ekonomi politik Keynesian serta memeriksa kebijakan pemerintah yang relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran ekonomi politik Keynesian dan peran kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep teoritis yang terkait dan dampak kebijakan pemerintah.

Sumber data untuk penelitian ini akan berasal dari jurnal-jurnal ilmiah terpercaya yang memiliki kredibilitas akademik. Jurnal-jurnal tersebut akan mencakup artikel-artikel yang membahas pemikiran ekonomi politik Keynesian dan kebijakan pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi. Penggunaan jurnal-jurnal ilmiah yang terverifikasi akan memastikan keandalan dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan dan analisis data melibatkan identifikasi jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan pemikiran ekonomi politik Keynesian dan kebijakan pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi konsep-konsep teoritis utama yang terkait dengan pemikiran ekonomi politik Keynesian dan kebijakan pemerintah serta menghubungkan pemikiran ekonomi politik Keynesian dengan kebijakan pemerintah yang dianalisis.

PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian

Ekonomi politik keynesian ialah sebuah pendekatan yang terdapat didalam ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Pendekatan ekonomi politik yang digagas oleh John Maynard Keynes mengajukan kritik terhadap konsep pasar yang meregulasi yang telah banyak digunakan oleh para pemikir klasik dan neoklasik sebelumnya. Teori ekonomi politik yang digagas oleh Keynesian menekan bahwa pemerintah wajib terlibat dalam mengatur kegiatan perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti mengatasi masalah resesi ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Teori klasik di era ekonomi politik klasik sebelumnya dinilai Keynes memiliki banyak kelemahan, sehingga perlu adanya perbaikan seperti masalah pada mekanisme dan keseimbangan pasar, ketenagakerjaan, analisis biaya, serta tabungan dan investasi. Sedangkan pada teori-teori neo-klasik, Keynes melakukan penyempurnaan teori yang bertujuan agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Dari perbaikan serta penyempurnaan kedua teori tersebut pada era zaman yang berbeda, dapat menunjukkan adanya peranan keynes dalam menjelaskan secara lebih lanjut dan lebih menyempurnakan ide serta konsep yang telah ada, terutama yang telah dimiliki oleh tokoh mazhab neo-klasik.

Salah satu buku yang diterbitkan Keynes yang paling terkenal: *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Didalam buku tersebut diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang kerja ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini akhirnya menciptakan mazhab baru yang dikenal sebagai mazhab ekonomi modern dan dikenal dengan sebutan mazhab Keynes. Mazhab ini dinilai oleh para ahli ekonomi dunia sebagai penyimpangan dari Neo-Klasik. Selain itu, didalam buku *Keynes: How to Pay for the War*. Keynes mengutarakan bahwa suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada saat zaman perang ialah dengan jalan tabungan paksa atau tabungan penanggulangan (Karim, 2017).

Pada masa kaum klasik mereka percaya bahwa perekonomian yang hanya dilandaskan pada mekanisme pasar tanpa campur tangan dari pemerintah akan memperoleh keseimbangan, sehingga kegiatan produksi akan otomatis menciptakan daya beli terhadap produk yang dihasilkan. Daya beli ini diperoleh

atas balas jasa untuk faktor-faktor produksi seperti upah, suku bunga, gaji, sewa, balas jasa atas faktor produksi lainnya. Pendapatan atau gaji yang diperoleh ini seluruhnya akan dibelanjakan.

Teori yang dikemukakan oleh J.B Say bahwa setiap penawaran dari jual beli akan menciptakan permintaannya sendiri. Teori ini dikritik oleh Keynes (Karim, 2017). Dalam kenyataannya permintaan lebih kecil dari penawaran dan tidak juga semua pendapatan yang diperoleh dibelanjakan tetapi sebagian ditabung. Hal ini dapat diketahui jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan yang dimana tidak semua produksi dapat diserap oleh masyarakat. Hal ini terbukti pada tahun 1929-1930 terjadi kelebihan produksi dalam jumlah besar sedangkan daya beli masyarakat terbatas. Hal inilah yang menjadi penyebab perusahaan terpaksa mengurangi produksi serta mengurangi jumlah pekerja.

Selain itu pada teori kaum klasik yang mengatakan full employment akan tercapai. Teori klasik ini juga dikritik Keynes, yang menyatakan bahwa pasar tenaga kerja tidak selamanya tercapai full employment (Deliarnov, 2016). Dimanapun para pekerja akan memperjuangkan upah mereka, yang berarti tidak semua buruh mau bersedia bekerja pada tingkat upah yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika tingkat upah diturunkan maka tingkat konsumsi masyarakat berkurang, yang dapat mendorong penurunan harga-harga, maka berakibat produktifitas tenaga kerja menurun. Ketika hal ini terjadi maka perusahaan akan mengambil tindakan untuk menghemat biaya produksi dengan mengurangi jumlah barang yang diproduksi serta mengurangi tenaga kerja. Maka dapat memberikan dampak pengangguran (tidak terjadi full employment)

Hubungan antara Pemikiran Keynesian dengan Kebijakan Pemerintah

Hasil pengamatan Keynes mengenai depresi ekonomi secara besar-besaran atau Great depression yang terjadi pada tahun 1929-1939 benar-benar membuat perekonomian di Amerika Serikat jatuh dan itu merupakan masa kelam yang pernah dialami negeri power sekarang ini. yang tidak dapat berhasil diselesaikan dengan metode klasik dan neo-klasik. Maka John Maynard Keynes merekomendasikan agar kegiatan perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar tetapi hingga batas tertentu peran pemerintah justru diperlukan untuk mengendalikan perekonomian nasional dengan regulasi-regulasi secara aktif sehingga dapat mempengaruhi arah gerak perekonomian sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi. Keynes juga mengkritik pendapat ahli ekonomi klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam pandangan Keynes tingkat dari kegiatan perekonomian ditentukan oleh belanja agregat hal ini terdapat didalam bukunya "The General Theory of Employment", (Ismail, Aslan, & Efendi, 2022).

Dari buku tersebut mengemukakan pandangan-pandangan baru mengenai aspek yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk kegiatan ekonomi ditinjau dari keseluruhan. Analisis dari teori Keynes yang berhubungan pada penerapan kebijakan pemerintah untuk kegiatan perekonomian saat ini meliputi aspek-aspek berikut: analisis mengenai peranan belanja agregat dalam menentukan tingkat kegiatan perekonomian, perubahan belanja agregat dan proses multiplier, penentuan suku bunga dan peranan uang dalam menentukan kegiatan ekonomi.

Pemikiran Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pemikiran Keynesian memotivasi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah intervensi ekonomi seperti yang disebutkan di atas untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mengatasi masalah pengangguran. Jadi, hubungan antara pemikiran ekonomi politik Keynesian dan kebijakan pemerintah adalah bahwa pemikiran Keynesian memberikan dasar teoritis untuk intervensi aktif pemerintah dalam perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu hubungan lain antara pemikiran ekonomi politik Keynesian dan kebijakan pemerintah adalah konsep kontrasyklis. Keynesianisme mengajukan ide bahwa pemerintah harus bertindak sebagai stabilisator ekonomi, yang berarti mereka harus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengimbangi fluktuasi alami dalam aktivitas ekonomi. Ini berarti bahwa pemerintah harus meningkatkan pengeluaran ketika ekonomi mengalami perlambatan (misalnya, dalam situasi resesi) melalui pengeluaran publik atau insentif fiskal, dan sebaliknya, mengurangi pengeluaran ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat untuk mencegah inflasi. Dengan demikian, pemikiran Keynesian memberikan landasan bagi pemerintah untuk merespons perubahan kondisi ekonomi dengan kebijakan yang sesuai untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Penerapan Ekonomi Keynesian dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah faktor yang memiliki peran penting dalam membangun kemajuan perekonomian pada suatu negara atau wilayah. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pertumbuhan pada sektor-sektor lain tidak akan dapat tercapai dengan baik, karena tanpa adanya kondisi ekonomi yang memadai, akan selalu berpusat pada tujuan jangka pendek yang ruang lingkup pemikiran yang sempit pula (Irawan & Suparmoko, 2014).

Tiga bentuk penerapan dari teori Keynes menjadi kebijakan pemerintah yang digunakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan pengawasan langsung (Sukirno, 2016).

Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh departemen keuangan dan alat yang digunakan ialah pengaturan anggaran pengeluaran/belanja dan pendapatan pemerintah (perpajakan). Jika dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal ini akan menerapkan mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Sebaliknya, ketika permasalahan pengangguran serius, maka pemerintah berusaha akan menambah pengeluaran dan mengurangi pajak. Dari kebijakan Keynes ini maka dapat mempengaruhi jalannya kegiatan perekonomian dengan menyuntikkan dana yang berupa pengeluaran pemerintah atau belanja negara untuk membangun proyek-proyek yang dapat mampu menyerap tenaga kerja.

Kebijakan moneter yang diatur oleh bank setral yaitu Bank Indonesia. alat kebijakan yang dilakukan adalah dengan mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga. Dari dua kebijakan ini maka pemerintah juga melakukan Pengawasan Langsung (direct controls), yaitu dengan membuat peraturan-peraturan. Contoh dari kebijakan-kebijakan seperti ini adalah mengawasi kenaikan upah para tenaga kerja agar tidak menyebabkan inflasi dan dengan menetapkan beberapa harga

bahan-bahan tertentu yang juga bertujuan untuk menghindari inflasi. Keynes menganggap campur tangan dari pemerintah ialah kewajiban terutama kegiatan perekonomian sedang berlangsung tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan diawal. Dengan kata lain pemerintah bertanggung jawab sebagai pengendali dan merencanakan jalannya perekonomian sehingga dapat berjalan sesuai apa yang ditetapkan.

Pokok pikiran dari teori ekonomi Keynes membawa pembaharuan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah mulai diperhatikan kondisi global atau menyeluruh (agregat/makro) dalam analisis ilmu ekonomi. Maka dari itu teori Keynes yang awal mulanya sebagai teori kritik ekonomi politik masa klasik dan neo-klasik telah berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Kedua, adanya peran pemerintah dalam analisis kegiatan perekonomian negara yang telah melahirkan pentingnya peranan analisis kebijakan. Ketiga, dengan diperlukannya analisis kebijakan, maka diperlukan studi-studi empirik untuk menghasilkan kebijakan. Maka dari itu, terjadilah perubahan serta penyempurnaan metodologi dalam analisis ekonomi, dari yang awalnya hanya menggunakan metode deduktif menjadi menggunakan induktif. Penerapan teori Keynes, menjadi bagian paling penting dalam mendukung pertumbuhan negara, terutama dalam kondisi dimana sumber daya belum diserap atau digunakan secara menyeluruh, penerapan teori ini sangat ampuh untuk meningkatkan output dan memberantas pengangguran.

KESIMPULAN

Hubungan antara pemikiran ekonomi politik Keynesian dan kebijakan pemerintah adalah bahwa pemikiran Keynesian memberikan dasar teoritis untuk intervensi aktif pemerintah dalam perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Penerapan Ekonomi Keynesian dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi ialah faktor yang memiliki peran penting dalam membangun kemajuan perekonomian pada suatu negara atau wilayah. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pertumbuhan pada sektor-sektor lain tidak akan dapat tercapai dengan baik, karena tanpa adanya kondisi ekonomi yang memadai, akan selalu berpusat pada tujuan jangka pendek yang ruang lingkup pemikiran yang sempit pula. Dari kebijakan Keynes ini maka dapat mempengaruhi jalannya kegiatan perekonomian dengan menyuntikkan dana yang berupa pengeluaran pemerintah atau belanja negara untuk membangun proyek-proyek yang dapat mampu menyerap tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Caporaso, J., & Levine. (1988). *Teori-teori Ekonomi Politik*. Terj. Surajji. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Curatman, A. (2010). *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Swagati Press.
- Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). *EKONOMI POLITIK. Analisis Kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2021*. Depok Sleman Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Deliarnov. (2016). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Ketiga)*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Irawan, & Suparmoko, M. (2014). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFEEYogyakarta .
- Ismail, Aslan, & Efendi, A. R. (2022). ANALISIS PENDEKATAN KEYNES TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Repository UINSI Samarinda*.
- Karim, A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . Depok: PT Raja Grafindo.
- Mause, K. (2019). "Political Economy". In: Alain Marciano & Giovanni B. Ramello (Eds.): *Encyclopedia of Law & Economics*. New York: Springer, pp.
- Mufti, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Todaro, M. (2011). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Yustika. (2009). *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.